

TESIS

DAMPAK EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN

KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Disusun dan diajukan oleh

FARIED BAINTA

P022191006



PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

WILAYAH/OTONOMI DAERAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**DAMPAK EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Disusun dan diajukan oleh

FARIED BAINTA

P022191006

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 16 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



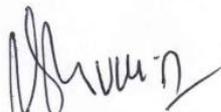
Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si
Nip. 196807021993031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Kurniaty, SE., M.Si
Nip.19800501201904001

Ketua Program Studi. Perencanaan
dan Pengembangan Wilayah



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng
Nip.196207271989031003



Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dra. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Nip.19670308 1990031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faried Bainta
NIM : P022191006
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Jenjang : Magister (S2)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juli 2021

Yang menyatakan



FARIED BAINTA

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw., juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam pengembangan produk pertanian haruslah benar-benar mengetahui dampak ekonomi dari produk yang diusahakan termasuk dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”.

Penulis menyadari bahwa tulisan Tesis ini dapat selesai karena bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan saran dan kritik serta dukungan moral. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Ibu Dr. Kurniaty. SE, M.Si sebagai Anggota Komisi Penasihat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Ibu Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE., M.Si., Bapak Dr. Ir. Rusnadi Padjung, M.Sc., dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si, sebagai dosen penguji atas saran dan masukannya dalam penyusunan tesis ini.

3. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menimba ilmu di Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, sebagai Dekan Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas kesempatannya melanjutkan studi ke jenjang Magister ini melalui program beasiswa Pemerintah Provinsi serta bantuannya dalam pengumpulan data sekunder penelitian.
6. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah atas bantuannya dalam pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian.
7. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng, sebagai Ketua program studi Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah/Otonomi Daerah.
8. Seluruh Dosen dan staf program Magister Perencanaan Pengembangan wilayah/Otonomi Daerah
9. Istri tercinta Suci Anastasia dan kedua orang tua kami yang telah banyak memberi dukungan, perhatian dan doanya
10. Saudara Andi Syamsul dan Muh. Arsyad yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data di lapangan.
11. Rekan-rekan S-2 Perencanaan Pengembangan Wilayah/Otonomi Daerah angkatan 2019 atas kebersamaannya selama perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, Juli 2021

Faried Bainta

ABSTRAK

FARIED BAINTA. *Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah* (dibimbing oleh Mahyuddin dan Kurniaty)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan menganalisis dua variabel yaitu dampak ekonomi dan dampak lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dalam pengumpulan data. Hasil analisis dampak ekonomi diperoleh dari analisis pendapatan usaha tani dan analisis *multiflier effect* dengan jumlah responden 253 orang. Sedangkan analisis dampak lingkungan diperoleh dari analisis skala litkert dan analisis spasial dengan jumlah responden 76 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dampak ekonomi, para petani kelapa sawit mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 22.636.045,-/ha/tahun, dan menciptakan *multiplier effect* sebesar 1,186 terhadap perekonomian wilayah Kecamatan Karossa. Sedangkan untuk dampak lingkungan yang ditimbulkan antara lain : terjadi perubahan kualitas air sungai, polusi udara, dan gangguan terhadap hewan endemik, serta telah terjadi pembukaan lahan sawit pada kawasan hutan lindung. Kelapa sawit telah memberikan dampak ekonomi yang baik namun belum maksimal sehingga peran penting pemerintah diperlukan untuk melakukan pembinaan terhadap petani dan semua pihak yang terkait agar dapat memperoleh hasil maksimal dari perkebunan sawit. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan pengawasan industri kelapa sawit yang ada di Kecamatan Karossa serta melakukan penertiban dan pengawasan terhadap masyarakat yang membuka lahan perkebunan sawit pada kawasan hutan lindung.

Kata kunci :Dampak Ekonomi, Dampak lingkungan, Kelapa Sawit, Ekspansi

ABSTRACT

FARIED BAINTA. Impact of Oil Palm Plantation Expansion in Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah (supervised by Mahyuddin and Kurniaty)

This study aims to analyze the impact of oil palm plantation expansion in Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah by analyzing two variables, namely the economic impact and the environmental impact.

This study uses a quantitative descriptive method, using simple random sampling technique in data collection. The results of the economic impact analysis were obtained from the analysis of farm income and the analysis of the multiplier effect with the number of respondents being 253 people. Meanwhile, the environmental impact analysis was obtained from a likert scale analysis and spatial analysis with a total of 76 respondents.

The results of the study show that for the economic impact, oil palm farmers get a profit of Rp. 22,636,045,-/ha/year, and creates a multiplier effect of 1,186 on the economy of the Karossa District area. Meanwhile, the environmental impacts caused include: changes in river water quality, air pollution, and disturbance to endemic animals, as well as the clearing of oil palm land in protected forest areas. Palm oil has given a good economic impact but has not been maximized so that an important role for the government is needed to provide guidance to farmers and all related parties in order to obtain maximum results from oil palm plantations. In addition, the government also needs to supervise the palm oil industry in Karossa District and control and supervise the people who clear oil palm plantations in protected forest areas.

Keywords: Economic Impact, Environmental Impact, Oil Palm, Expansion

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
1. Ruang Lingkup Wilayah.....	8
2. Ruang Lingkup Materi.....	9
F. Diagram Alur Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit	10
B. Pembangunan Ekonomi Daerah	14
C. Pengaruh Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi	19
D. Pengaruh Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan	26
E. Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah	34
F. Penelitian Terdahulu	38
BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Rencana Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	46
1. Jenis Data.....	46
2. Sumber Data	47
D. Populasi dan Sampel	49
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Kuesioner (Angket).....	53
2. Wawancara.....	54
3. Observasi.....	56

4.	Dokumentasi	57
F.	Variabel Penelitian	58
G.	Teknik Analisis Data	58
1.	Analisis Deskriptif Kuantitatif.....	59
2.	Analisis Pendapatan Usahatani.....	59
3.	Analisis <i>Multiplier Effect</i>	62
4.	Analisis Skala Litkert.....	64
5.	Analisis Keruangan (Spasial).....	69
H.	Kerangka Pikir Penelitian	71
BAB IV	GAMBARAN UMUM	72
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
B.	Kelapa Sawit Kecamatan Karossa	75
C.	Identitas Responden Berdasarkan Tujuan Penelitian Dampak Ekonomi	76
1.	Jenis Kelamin.....	76
2.	Usia	77
3.	Pendidikan Formal	78
4.	Tingkat Pendapatan	79
5.	Jumlah Tanggungan Keluarga.....	80
D.	Identitas Responden Berdasarkan Tujuan Penelitian Dampak Lingkungan	81
1.	Jenis Kelamin.....	82
2.	Usia	82
3.	Pendidikan Formal	83
4.	Pekerjaan.....	85
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A.	Analisis Dampak Ekspansi Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi Masyarakat Kecamatan Karossa	87
1.	Analisis Pendapatan Usaha Tani	87
2.	Analisis <i>Multiplier Effect</i>	111
B.	Analisis Dampak Ekspansi Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan ...123	
1.	Analisis Skala Likert (Persepsi Masyarakat).....	123
2.	Analisis Pola Ruang dan Penutupan Lahan	146
BAB V	PENUTUP	159
A.	Kesimpulan	159
B.	Saran	160

DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN	166
Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian untuk Dampak Ekonomi.....	167
Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian untuk dampak lingkungan.....	170
Lampiran 3. Profil Responden Petani Kelapa Sawit Kecamatan Karossa	173
Lampiran 4. Profil Responden Masyarakat Desa Kambunong Kecamatan Karossa	187
Lampiran 5. Biaya Rata-Rata Investasi Awal Usaha Tani Kelapa Sawit Per Hektar	191
Lampiran 6. Biaya Tenaga Kerja Petani Kelapa Sawit Kecamatan Karossa.	216
Lampiran 7. Biaya Pupuk dan Pestisida Petani Kelapa Sawit Kecamatan Karossa	227
Lampiran 8. Total Biaya Pengeluaran Petani Kelapa Sawit Kec. Karossa Tahun 2020.....	238
Lampiran 9. Penerimaan Petani Kelapa Sawit Kecamatan Karossa Tahun 2020	245
Lampiran 10. Pendapatan Petani Kelapa Sawit Kecamatan Karossa Tahun 2020.....	252
Lampiran 11. Pengeluaran Rumah Tangga Petani Sawit Kecamatan Karossa per Bulan.....	259
Lampiran 12. Tanggapan Responden untuk Kuisisioner Dampak Lingkungan	270
Lampiran 13. Hasil Penilaian/Tanggapan Responden untuk Kuisisioner Dampak Lingkungan.....	274
Lampiran 14. Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah	275

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015-2019 (ton)	4
Tabel 2.	Perkembangan Komoditas Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 3.	Luas Tanam dan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019	6
Tabel 4.	Penelitian Terdahulu	38
Tabel 5.	Jenis dan Sumber Data	48
Tabel 6.	Metode Pengumpulan Data	57
Tabel 7.	Variabel Penelitian.....	58
Tabel 8.	Kerterkaitan Indikator Analisis Multiplayer Effect	64
Tabel 9.	Variabel, Indikator dan kriteria Penilaian menggunakan Analisis Skala Litker	67
Tabel 10.	Matriks Penelitian	70
Tabel 11.	Tabel Karakteristik Petani Kelapa sawit Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020	88
Tabel 12.	Biaya Investasi Awal Usaha Tani Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa	89
Tabel 13.	Peralatan yang digunakan oleh petani Kelapa Sawit Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah.....	91
Tabel 14.	Biaya Tenaga Kerja yang digunakan oleh petani kelapa sawit di Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah	96
Tabel 15.	Pupuk dan Pestisida yang digunakan oleh petani kelapa sawit di Kecamatan Karossa.....	100
Tabel 16.	Rata-rata Jenis Pengeluaran Rutin Kebutuhan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa Per Bulan	107
Tabel 17.	Karakteristik Responden Petani Sawit Kecamatan Karossa berdasarkan luas lahan	109
Tabel 18.	Jenis Kebutuhan Tenaga Kerja Upah Usaha Tani Kelapa Sawit Kecamatan Karossa Tahun 2020.....	113
Tabel 19.	Persepsi Responden terhadap kualitas air sungai Salupangkang	125
Tabel 20.	Hasil Penilaian Responden terhadap persepsi kualitas air Sungai Salupangkan	126
Tabel 21.	Persepsi Responden terhadap Kualitas Udara	131
Tabel 22.	Hasil Penilaian Responden terhadap persepsi kualitas udara	132
Tabel 23.	Persepsi Responden terhadap Kualitas Air Tanah	134
Tabel 24.	Hasil Penilaian Responden terhadap persepsi kualitas Air Tanah.....	135

Tabel 25. Persepsi Responden Tentang Gangguan Terhadap Hewan Endemik	136
Tabel 26. Hasil Penilaian Responden Tentang Gangguan Terhadap Hewan Endemik.....	138
Tabel 27. Persepsi Responden Terhadap Banjir	143
Tabel 28. Hasil Penilaian Responden terhadap Banjir.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian	9
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian	46
Gambar 3. Teknik Random Sampling.....	47
Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian.....	71
Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah.....	74
Gambar 6. Perbandingan Jenis Kelamin Responden	76
Gambar 7. Perbandingan Usia Produktif dan Tidak Produktif Responden	77
Gambar 8. Perbandingan Tingkat Pendidikan Responden.....	79
Gambar 9. Perbandingan Tingkat Pendapatan Responden	80
Gambar 10. Perbandingan Jumlah Tanggungan Responden	81
Gambar 11. Perbandingan Jenis Kelamin Responden	82
Gambar 12. Perbandingan Usia Responden	83
Gambar 13. Perbandingan Tingkat Pendidikan Responden.....	85
Gambar 14. Perbandingan Jenis Pekerjaan Responden	86
Gambar 15. Perbandingan Biaya Investasi Awal Usaha tani Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa	90
Gambar 16. Biaya Peralatan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah	92
Gambar 17. Biaya Tenaga Terja Usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa	96
Gambar 18. Jenis Pengeluaran Petani Kelapa Sawit Kecamatan Karossa	108
Gambar 19. Karakteristik Petani Kelapa Sawit berdasarkan Luas Lahan di Kecamatan Karossa.....	109
Gambar 20. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020.....	120
Gambar 21. Produksi Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015-2019	120
Gambar 22. Angka Kemiskinan di Kabupaten Mamuju tengah Tahun 2015-2019	121
Gambar 23. Persepsi Responden Terhadap Pencemaran Air Sungai	126
Gambar 24. Persepsi Responden Terhadap Pencemaran Udara.....	131
Gambar 25. Persepsi Responden Terhadap Pencemaran Air Tanah.....	134
Gambar 26. Persepsi Responden Tentang Gangguan Terhadap Hewan Endemik	137
Gambar 27. Peta Arahkan Kawasan Suaka Alam Satwa Endemik Burung Maleo	142
Gambar 28. Persepsi Responden Terhadap Banjir	144

Gambar 29. Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa.	147
Gambar 30. Peta Citra Satelit Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah	148
Gambar 31. Peta Perkembangan areal Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.....	149
Gambar 32. Peta Pola Ruang Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.....	152
Gambar 33. Peta Sebaran Lahan Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa	153
Gambar 34. Peta Kawasan Hutan Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah	158

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pergeseran dalam paradigma pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis berubah menjadi desentralisasi yaitu dengan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri dengan mengelola setiap potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya. Walaupun akhir-akhir ini beberapa wewenang yang dahulu diberikan kepada pemerintah daerah ditarik kembali oleh pemerintah pusat namun wewenang yang diberikan masih cukup besar untuk digunakan dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya.

Tujuan pelaksanaan pembangunan di daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar menjadi lebih baik, memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih efektif dan efisien. Faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia yang berkualitas, perekonomian daerah yang stabil, kemampuan keuangan daerah yang baik, infrastruktur yang memadai, kemudahan akses pelayanan publik di daerah, serta terjaganya ekosistem lingkungan sebagai sumber kehidupan. Apabila daerah tidak mampu menciptakan faktor - faktor pendukung sesuai dengan kriteria yang

telah ditetapkan pemerintah, maka tujuan pembangunan daerah akan sulit dicapai. Kegagalan dalam mengembangkan faktor pendukung tersebut menyebabkan timbulnya kesenjangan antara daerah perdesaan dan perkotaan, yang berakibat pada munculnya daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang (Ramadhani, Gunarto, & Taher, 2018).

Perkembangan suatu wilayah tidak dapat berlangsung secara merata disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor alami (geografis, sumberdaya manusia, sumberdaya alam) maupun faktor buatan manusia (termasuk infrastruktur dan sumberdaya sosial) yang tersebar secara tidak merata dalam wilayah. Kondisi ini selain menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan juga dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya daerah tertinggal atau terbelakang (Djuwendah, Hapsari, Renaldy, & Saidah, 2013).

Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia, cenderung mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan dengan daerah miskin sumber daya alam tetapi memiliki kemampuan sumber daya manusia yang tinggi. Keberadaan sumber daya alam akan menjadi bencana ketika perekonomiannya tidak maju atau secara pendapatan per kapita daerah tinggi, namun ketimpangan antara orang kaya dan miskin tinggi (Sholikin, 2019).

Dalam konteks era otonomi daerah saat ini, khususnya menyangkut otonomi kabupaten dan kota, pembangunan wilayah menjadi isu yang sangat penting dalam rangka untuk menyejahterakan

masyarakat. Dengan otonomi, memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya masing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputri, 2016). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kabupaten dan kota saat ini dan pada masa mendatang adalah kemampuan daerah mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang tepat sehingga tujuan dari otonomi daerah dapat terwujud.

Salah satu daerah otonom baru yang belum lama ini memekarkan diri di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju pada tahun 2013. Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Menurut data Badan Pusat statistik tahun 2019, Provinsi Sulawesi Barat merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di wilayah Indonesia Bagian Timur dengan jumlah produksi sebesar 441.090 ton, dan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju Tengah. Perkebunan kelapa sawit

merupakan salah satu program strategis ekonomi pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai potensi untuk berbagai jenis komoditi pertanian khususnya tanaman perkebunan kelapa sawit. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019 Kelapa Sawit adalah komoditi perkebunan dengan jumlah produksi yang paling tinggi dibandingkan komoditas perkebunan lainnya yang ada di Kabupaten Mamuju tengah. Hasil produksi komoditas perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015-2019 (ton)

No	Komoditi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelapa Sawit	34.941	109.632	106.383	106.003	102.578
2	Kakao	9.356	7.213	6.789	14.678	6.529
3	Kelapa Dalam	253	961	890	1.440	892
4	Cengkeh	12	60	61	-	-
5	Lada	-	7	8	-	-
6	Pala	23	-	0	-	-
7	Kopi	44	90	14	32	14
8	Kemiri	67	6	5	-	-
9	Aren	-	20	17	-	-

Sumber : Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka (diolah)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk

memasarkan minyak sawit dan inti sawit, baik di dalam maupun luar negeri. (Amalia, Dharmawan, Prasetyo, & Pacheco, 2019).

Perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah sangat signifikan, ini dapat di lihat dengan terus meningkatnya luas panen dan produksi, terutama pada pada tahun 2015 hingga 2016 dengan peningkatan produksi kelapa sawit mencapai 68,1%, namun dalam beberapa tahun terakhir produksi mengalami sedikit penurunan walaupun luas panen terus mengalami peningkatan, ini disebabkan karena adanya peremajaan tanaman kelapa sawit. Data perkembangan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Komoditas Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
2015	16.222	2.598	34.941
2016	41.641	3.419	109.632
2017	47.587	3.376	106.383
2018	41.998	-	106.003
2019	-	-	102.578

Sumber : Kabupaten Mamuju Tengah dalam angka (diolah)

Penyebaran perkebunan kelapa sawit ditemukan di semua kecamatan di Mamuju Tengah (Bappeda Mamuju Tengah, 2019). Perkebunan kelapa sawit menjadi andalan di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, salah satunya adalah Kecamatan Karossa.

Tabel 3. Luas Tanam dan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
Pangale	1.665	4.244
Budong-Budong	9.592	23.556
Tobadak	11.153	24.720
Topoyo	7.291	26.958
Karossa	12.297	23.100

Sumber : Kabupaten Mamuju Tengah dalam angka 2020

Perkebunan kelapa sawit menjadi primadona warga masyarakat, mereka menilai budidaya perkebunan sawit lebih mudah dan memberikan keuntungan yang lebih besar, sehingga sebagian warga kabupaten Mamuju Tengah mengganti tanaman pohon kakao dan tanaman pertanian lainnya yang telah lama menjadi sumber mata pencaharian penduduk menjadi tanaman kelapa sawit (Mongobay, 2020). Menurut Sinta, (2019) Pendapatan petani kelapa sawit Kabupaten Mamuju Tengah tidak mengalami kerugian. Usaha tani kelapa sawit tergolong sedang untuk membiayai hidup rumah tangga petani kelapa sawit. Pendapatan usahatani sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kelapa sawit karena dari hasil usaha kelapa sawit mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi, memiliki kendaraan baik itu mobil maupun motor, memiliki investasi berupa arisan dengan tetangga maupun dengan keluarga.

Namun, di atas semua itu kelapa sawit juga menyimpan berbagai permasalahan karena perkebunan sawit ditengarai sebagai salah satu pemicu berbagai permasalahan lingkungan, seperti deforestasi, polusi perairan, degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati

(Obidzinski, Andriani, Komarudin, & Andrianto, 2012). Pada wilayah Kecamatan karossa Kabupaten Mamuju Tengah diduga telah terjadi pencemaran yang berasal dari limbah pabrik pengolahan sawit yang tidak dikelola dengan baik sehingga diduga telah menyebabkan rusaknya ekosistem sungai, mengakibatkan air sungai yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas menjadi tercemar seperti menimbulkan bau busuk, mengganggu penghasilan petani tambak, dan mengubah wilayah tangkap nelayan sungai (Mongobay, 2020).

Dari berbagai hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan agar tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat ditinjau dari sektor ekonomi di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

2. Bagaimana dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat ditinjau dari sektor lingkungan di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak :

1. Menganalisis dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat ditinjau dari sektor ekonomi di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Menganalisis dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat ditinjau dari sektor lingkungan di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat sebagai penentu dan pengevaluasi kebijakan agar dalam hal pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan kesejahteraan warganya secara keseluruhan dan menjaga keseimbangan lingkungan untuk masa depan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

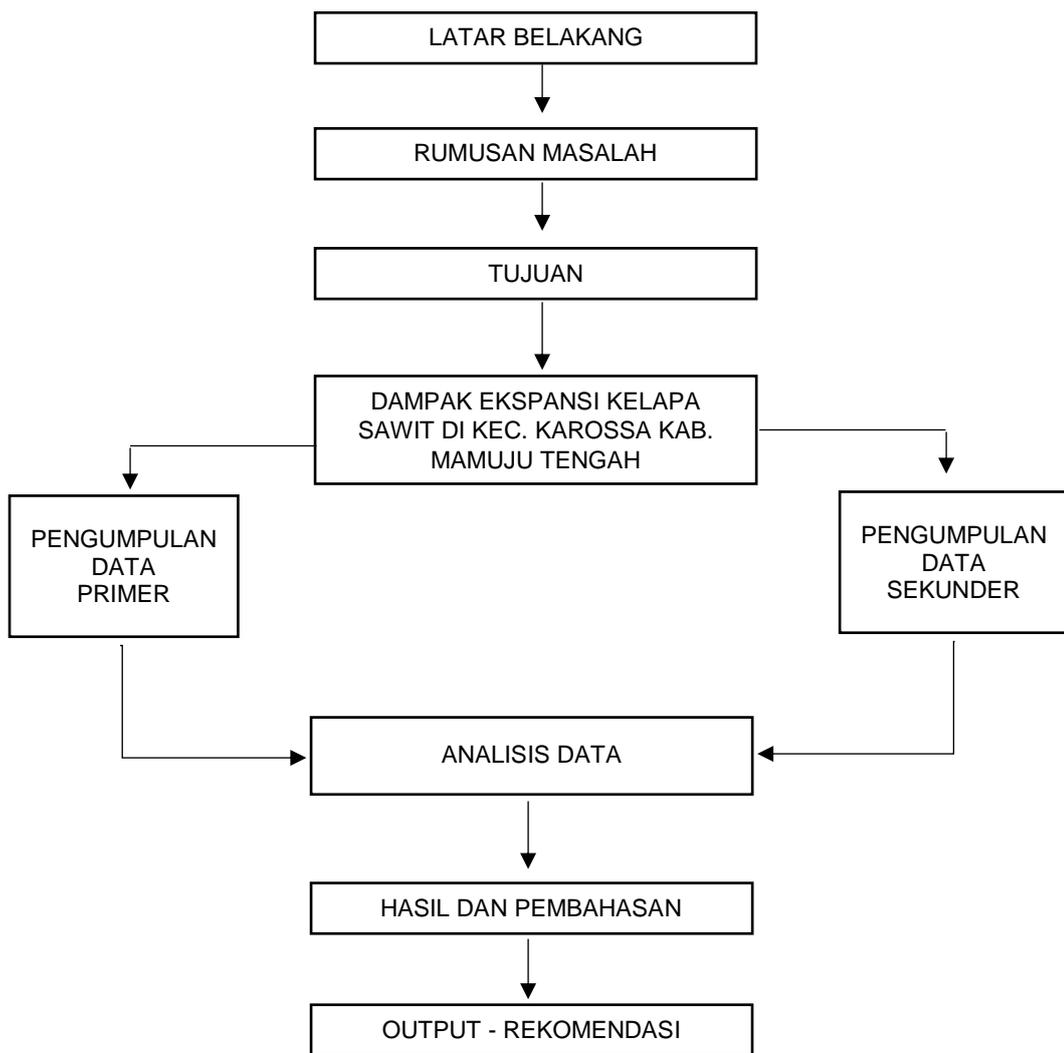
1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah atau lokasi studi yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini di fokuskan pada masalah ekonomi dan lingkungan, yaitu dampak yang ditimbulkan dari perluasan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

F. Diagram Alur Penelitian



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) bukan tanaman asli Indonesia melainkan dari Benua Afrika, tepatnya dari sebuah kawasan di sepanjang pantai yang membentang sejauh 200 – 300 kilometer antara Liberia dan Angola. Bentangan arealnya mulai dari utara, ke selatan dan timur menuju Senegal, Tanzania dan Madagaskar (Buku sawit Rakyat). Perkebunan sawit di Afrika Barat tersebut dikelola oleh pekerja kebun secara swadaya di atas lahan yang luasnya mencapai 7,5 hektar (Budidarsono & Susanti, 2012). Selama ribuan tahun masyarakat Afrika mengenal cara mengolah sawit menjadi minyak untuk memasak makanan. Sedikitnya 32 barel minyak sawit dari Afrika untuk pertama kali diangkut ke Eropa oleh Kapten James Welsh dengan kapal laut yang berlayar dari Benin ke Inggris pada 1591. Selama Abad 14 sampai 17 Masehi, bibit tanaman sawit dibawa keluar dari Afrika ke Benua Amerika, kemudian menyusul penyebaran yang lebih luas lagi ke kawasan Asia Tenggara (Sumardjono et al., 2018).

Sebagian ahli meyakini bibit tanaman sawit yang pertama kali masuk kawasan Asia Tenggara berasal dari Benua Amerika. Namun ada beberapa pendapat lain meyakini sawit di Asia Tenggara dibawa langsung dari Mauritania, sebuah negara kepulauan kecil yang berada di Samudra Hindia. Meski perdebatan asal-usul bibit sawit di kawasan Asia Tenggara masih terus berlangsung, para ahli sepakat bahwa empat bibit sawit yang ditanam

di Pulau Jawa pada 1848 adalah cikal bakal bagi seluruh perkebunan sawit di kawasan Asia Tenggara (Henderson & Osborne, 2000).

Dalam sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia, pembukaan perkebunan kelapa sawit terbagi dalam lima periode, yaitu (Masyithoh, 2017) :

1. Periode penjajahan Belanda (1600-1942)

Pada awalnya sistem perkebunan di Indonesia menganut sistem tradisional. Saat VOC datang pada tahun 1600, sistem ini berubah menjadi perusahaan perkebunan melalui perubahan teknologi dan organisasi proses produksi. Pada masa tersebut, sistem usaha kebun rakyat dieksploitasi sebagai komoditi perdagangan Belanda. Fauzi *et al* (2012) mengungkapkan bahwa Indonesia kala itu mampu menggeser dominasi ekspor Afrika, namun demikian hal ini hanya meningkatkan perekonomian

Belanda, tanpa meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Perubahan kebijakan politik kolonial yang semula menganut kebijaksanaan politik konservatif beralih menjadi kebijaksanaan politik liberal pada tahun 1870-an yang ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang Agraria. Undang-undang Agraria 1870 menjadi pintu masuknya modal besar swasta di bidang perkebunan. Sistem ini menyebabkan munculnya investasi besar-besaran swasta asing (khususnya Belanda) dan sejumlah perkebunan besar di Jawa dan Sumatera.

2. Periode pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa pendudukan Jepang, ekonomi perkebunan mengalami penurunan karena kebijaksanaan pemerintah Jepang dalam meningkatkan produksi pangan untuk kepentingan ekonomi perang dengan melakukan pergantian tanaman perkebunan menjadi tanaman pangan. Pada masa itu sebanyak 16% dari lahan sawit diubah menjadi lahan tanaman pangan.

3. Masa pemulihan perkebunan (1945-1955)

Selama periode 1945-1949 politik di Indonesia masih belum stabil. Hal ini menyebabkan pembangunan dan perkembangan ekonomi menjadi terkendala dan merosot. Kemudian dilakukan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag yang menghasilkan ketentuan bahwa perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dan swasta asing akan diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Program pemulihan perkebunan oleh pemerintah Indonesia ini dimulai pada tahun 1951 yang menjadi titik awal beroperasinya kembali perusahaan perkebunan di pulau Jawa dan luar Jawa.

4. Periode pengalihan/nasionalisasi perkebunan dari swasta asing ke PNP/PTP dan perkembangan pada pemerintahan orde baru (1956-1990 an)

Perusahaan perkebunan (termasuk kelapa sawit) milik kolonial Belanda dinasionalisasi menjadi Perkebunan Negara atau sekarang dikenal dengan Perusahaan Perkebunan Negara (PTN) dipicu oleh tuntutan pemerintah Indonesia atas kedaulatan Irian Barat. Kondisi ini mendorong Perdana Menteri/ Menteri Pertahanan Djuanda Kartawidjaja

mengeluarkan peraturan yang menempatkan seluruh perkebunan Belanda berada dalam yuridiksi Republik Indonesia dan Menteri Pertanian memegang wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang diperlukan. Pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang No.5 mengenai pokok-pokok agraria dan Undang-Undang penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA) (UU No.1 tahun 1967 dan UU No.6 tahun 1968). Hal tersebut memicu perkembangan luas areal kelapa sawit, namun hingga tahun 1976 perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya terdiri atas perkebunan negara dan perkebunan swasta. Perkebunan kelapa sawit rakyat muncul pada tahun 1980 setelah dikeluarkannya kebijakan Perkebunan Inti rakyat (PIR) di mana perkebunan swasta dan perkebunan negara berperan sebagai inti sedangkan masyarakat sekitar sebagai anggota koperasi. Pemerintah juga memberi dukungan melalui penyediaan perkreditan murah yaitu Kredit Perkebunan Besar Swasta Negara (PBSN) mulai dari PBSN I (1977-1981), PBSN II (1981-1986), dan PBSN III (1986-1990) dan kemudian berubah menjadi kredit koperasi primer anggota (KKPA) untuk koperasi di tahun 1996. Pola PIR yang dikembangkan antara lain adalah PIR Lokal (1980), PIR Transmigrasi (1986), dan PIR-berbantuan *Asian Development* .

5. Periode pembangunan perkebunan 2000-2004 dan awal pelaksanaan UU Perkebunan no. 18 tahun 2004

Kegiatan pembangunan pada tahun 2000-2004 merupakan era reformasi pembangunan di segala bidang yang menyebabkan

perubahan paradigma manajemen pembangunan nasional yang semula di bawah kewenangan pemerintah menjadi kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memosisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan, sehingga terjadi perimbangan kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah dan masyarakat. Perubahan paradigma ini menggeser inisiatif yang semula merupakan dominasi pemerintah menjadi dominasi masyarakat, pendekatan sektoral menjadi pendekatan jejaring kerja, sentralisasi menjadi desentralisasi, sistem komando menjadi sistem bebas, dan pendekatan produksi menjadi pendekatan produktivitas. Pembangunan perkebunan yang dilakukan memiliki visi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui sistem dan usaha perkebunan yang efektif, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

B. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk satu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Subandi, 2011).

Dalam pembangunan ekonomi daerah, yang menjadi pokok permasalahan adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan

yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini, mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya –sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

Pembangunan bermakna perubahan, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia. Peningkatan standar hidup, perbaikan pendidikan dan kesehatan serta keadilan dalam berbagai kesempatan adalah unsur-unsur yang esensial dalam pembangunan ekonomi.

Pendapatan per kapita tanpa disertai dengan adanya transformasi sosial dan struktur ekonomi belum di pandang sebagai pembangunan. Mengukur pembangunan adalah sulit, karena menyangkut aspek-aspek bukan material, sehingga pengukuran pembangunan sering dipersempit dengan pembangunan ekonomi (Hidayat, 2006).

Pembangunan adalah merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad setiap orang atau suatu masyarakat untuk berusaha sekeras mungkin dengan melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional untuk kehidupan yang serba lebih baik (Todaro & Smith, 2006). Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yaitu (1). kecukupan (*sustenance*): kemampuan setiap orang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi bisa menghentikan kehidupan seseorang meliputi kebutuhan sandang, pangan, Kesehatan, dan keamanan, (2) Harga Diri (*self-esteem*): menjadi manusia seutuhnya adanya dorongan dari dalam diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa layak dan pantas melakukan atau mengejar sesuatu, dan (3) Kebebasan (*freedom*): kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materil dalam kehidupan.

Menurut Todaro dan Smith (2006) ada tiga tujuan inti dari pembangunan itu sendiri yaitu (1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan, (2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan, dan (3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup dan yang terakhir pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perubahan evolutif dari pengertian di atas didasarkan atas banyak kekecewaan dan hasil umpan balik dari pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan serta kekurangan informasi dalam memahami persoalan-persoalan yang timbul yang sebelumnya tidak dapat diramalkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Ekaputra, 2009).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai perubahan dalam banyak aspek kehidupan manusia yang bertujuan dan memberi harapan kepada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan lebih merata yang dalam jangka panjang agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada dasarnya, dalam pembangunan tersebut memperhatikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya seperti perubahan teknologi, institusi (kelembagaan), dan nilai-nilai sosial dapat diakomodasikan ke dalam kebijaksanaan dalam situasi yang terus menerus berubah. Sehingga pengaturan dan kebijaksanaan yang sebelumnya cocok dengan keadaan suatu tahapan pembangunan, kemudian memerlukan reformasi pengaturan dan kebijaksanaan baru yang diperlukan sesuai dengan perubahan dinamika dan interaksinya antara faktor-faktor fisik, ekonomi dan sosial yang terus berubah (Ekaputra, 2009).

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin (Badan Pusat Statistik, 2019).

Secara umum pembangunan ekonomi merupakan proses ekonomi yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita penduduk dalam

suatu daerah dalam kurun waktu yang panjang. Hal tersebut diikuti dengan pergeseran fundamental pada struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan untuk penduduk suatu daerah yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi bermanfaat dalam memberikan perubahan dalam masyarakat. Baik itu dari sisi teknologi, *mindset* masyarakat, ataupun kelembagaan. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah sekumpulan proses dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam suatu daerah. Pembangunan ekonomi ini penting adanya untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial masyarakatnya yang tak lepas juga dari pertumbuhan ekonomi.

C. Pengaruh Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi

Industri kelapa sawit memiliki kontribusi dan peran penting dalam peningkatan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Perkembangan kelapa sawit memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi, *output*, dan devisa. Industri berbasis kelapa sawit juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di industri kelapa sawit (Susila, 2004)

Menurut Utami, Kumala Putri, & Ekayani, (2017) Perkebunan kelapa sawit memiliki dampak ekonomi terhadap masyarakat, akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah perubahan pendapatan petani. Akibat melakukan ekspansi kebun kelapa sawit petani memperoleh manfaat secara ekonomi berupa peningkatan pendapatan. kegiatan perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak terhadap percepatan

pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Penelitian lain mengemukakan dampak ekonomi akibat ekspansi kelapa sawit dapat meningkatkan peluang investasi yang beragam serta menghasilkan pendapatan yang stabil.

Industri sawit punya andil bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak 2015, nilai ekspor sawit menduduki posisi kedua tertinggi (12,3 miliar dolar AS) dari seluruh komoditas ekspor nasional, setelah batubara, mengalahkan minyak bumi dan gas bumi. Berdasarkan studi KPK, dari perkiraan potensi penerimaan pajak dari sektor perkebunan sawit sebesar Rp 45-50 triliun per tahun (Sumardjono et al., 2018). Selain itu, industri sawit juga menyediakan lapangan kerja bagi sekitar enam juta penduduk miskin di pedalaman Indonesia. Dengan harapan mewujudkan Indonesia menjadi produsen bahan bakar nabati (biofuel) terbesar di dunia, pemerintah memprediksi industri biofuel sanggup menyerap 3,6 juta tenaga kerja di wilayah pedalaman, sekaligus mengurangi 16 persen kemiskinan. Tak ayal, industri sawit menjadi pilihan solusi pemerintah bagi tingginya tingkat pengangguran nasional (Sumardjono et al., 2018).

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat setempat tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tersier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang

tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu. Selain besaran jumlah pendapatan pada masing-masing rumah tangga petani kelapa sawit, hal yang perlu dicermati dalam mengamati dampak pelaksanaan investasi perkebunan adalah timbulnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan perkebunan yang memungkinkan terbukanya peluang usaha lainnya (Syahza, 2011).

Tingginya mobilitas penduduk akibat kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan pada daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Semua bentuk pengeluaran oleh petani apakah pengeluaran rutin atau pengeluaran untuk kebutuhan pemeliharaan kebun, pada umumnya dapat diperoleh di daerah, antara lain; pasar kecamatan, pasar desa, kedai-kedai, koperasi petani, atau pada pedagang keliling. Khusus untuk kebutuhan sarana produksi pada umumnya memakai alat hasil produksi daerah pedesaan (industri rumah tangga) seperti, angkong (gerobak), dodos,

parang, engrek, tojok, dan cangkul. Sedangkan untuk jenis *sprayer* kebanyakan dibeli di pasar kabupaten. Apabila dikaji dari struktur biaya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha (Syahza, 2011).

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumber daya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban

perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain) (Syahza, 2011).

Kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit baik perusahaan inti maupun plasma membutuhkan tenaga kerja langsung (tidak termasuk *skilled-labour*) dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolaannya. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar perkebunan, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan yang diambil dari masyarakat desa sekitarnya. Kegiatan perkebunan kelapa sawit itu menyerap tenaga kerja cukup banyak, di samping itu kegiatannya bersifat manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan. Adanya aktivitas kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, khususnya pengadaan sarana prasarana khususnya pembangunan jaringan jalan menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hal itu berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan. Kegiatan pembangunan jaringan jalan juga meningkatkan mobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di pedesaan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri. Pengadaan kebutuhan perusahaan dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat, itu merupakan salah satu dampak positif terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif dapat diindikasikan oleh peningkatan pendapatan per kapitanya. Salah satu parameter yang paling mudah dilihat secara kuantitatif adalah penyerapan tenaga kerja yang

meningkatkan pendapatan dari upah tenaga. Bentuk upah yang dapat diterima oleh tenaga kerja lokal adalah: pemanen, timbang dan muat, pembersihan lahan, pemberantasan hama (Syahza, 2011).

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan kecuali kota Pekanbaru. Jika dilihat dari segi dampak ekonominya menunjukkan hasil yang menggembirakan yakni terjadinya jumlah uang beredar di pedesaan. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, yang pada akhirnya meningkatnya mobilitas barang dan jasa ke depan (*foreward linkages*). Proses *foreward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (alsintan). Dari segi penanaman investasi sektor perkebunan yang

dilaksanakan, hampir semua daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi (Syahza & Nasrul, 2013).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke menjadi perkebunan kelapa sawit, areal yang dulunya lahan sawah, kebun Jambu Mente dan kebun campuran dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit melalui sistem sewa lahan dengan pola kemitraan dengan perusahaan sawit. Alih fungsi lahan tersebut telah mengakibatkan petani kehilangan sumber nafkah hidupnya sehingga harus mencari sumber penghasilan lain yang bersumber dari *non farm* (Puspitasari, 2020)

Salah satu manfaat ekonomi dari hadirnya kegiatan perkebunan sawit dan perusahaan adalah adanya harapan bagi petani untuk memperoleh keuntungan dengan memititkan lahan sawahnya ke perusahaan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit. Sementara bagi perusahaan membeli atau bermitra dengan petani bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dengan menjanjikan ganti rugi yang besar agar masyarakat menjadi mitra perusahaan melalui konversi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit. Beberapa penduduk merasa diuntungkan oleh hadirnya perusahaan sawit. salah satu dampak positif yang dapat dirasakan dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit adalah terciptanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat lokal di sekitar perkebunan. Menjadi buruh sawit adalah

pekerjaan yang dapat dilakoni oleh masyarakat yang pada umumnya mempunyai pendidikan dan keterampilan yang rendah (Puspitasari, 2019).

Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit telah memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Manfaat yang paling penting adalah kegiatan perkebunan kelapa sawit akan membuka lapangan kerja baru bagi penduduk setempat. Para pekerja akan mendapatkan penghasilan dengan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Hal ini akan mendorong munculnya aktivitas kegiatan ekonomi diluar dari kegiatan langsung perkebunan kelapa sawit. Sehingga penduduk yang bekerja pada usaha baru, mendapatkan penghasilan di luar kegiatan perkebunan kelapa sawit. Pendapatan ini sering disebut pendapatan *derivatif*. Pada sisi lain keberadaan perkebunan kelapa sawit memberikan manfaat dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat di sekitarnya sebagai bentuk kepedulian perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit, masyarakat memperoleh fasilitas sosial. Seringkali bentuk kepedulian tersebut adalah perbaikan jalan, pemberian santunan, bakti sosial, pelayanan kesehatan, dan lainnya (Puspitasari, 2019)

D. Pengaruh Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan

Selain mendapatkan manfaat ekonomi, ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki potensi yang besar untuk munculnya berbagai masalah lingkungan dalam suatu daerah (Yusop, Hui, Garusu, & Katimon, 2008). Perluasan perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan deforestasi,

meningkatkan emisi karbon, dan perubahan iklim, sehingga dapat mengganggu kondisi lingkungan (Pacheco, 2012).

Sejarah industri sawit Indonesia melibatkan dinamika politik dan ekonomi yang rumit. Di Indonesia, industri sawit bangkit dengan melibatkan peran lembaga yang mengurus fungsi dan legalitas lahan. Masalahnya, lembaga tersebut beroperasi dengan kewenangan dan regulasi yang tumpang-tindih. Dibangun di atas institusi alokasi lahan dengan kewenangan dan regulasi yang tumpang tindih, praktek perkebunan sawit Indonesia ditengarai sebagai salah satu pemicu konflik sosial dan berbagai permasalahan lingkungan, seperti deforestasi, pembukaan lahan gambut, polusi perairan, degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati (Obidzinski et al., 2012). Perkebunan sawit, yang merupakan kegiatan *monoculture* dengan laju ekspansi tertinggi di dunia (Gerber, 2011), diduga telah menjadi penyebab utama berubahnya fungsi lahan hutan Indonesia selama beberapa dasawarsa belakangan ini (Koh & Ghazoul, 2010). Lee, Ghazoul, Obidzinski, & Koh, (2013) mencatat bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan besar bertanggung jawab atas 90 persen hilangnya hutan di Sumatra dari tahun 2000 sampai 2010. Ditambah lagi, pembukaan lahan dengan cara membakarnya menjadikan situasi makin parah. Menurut Varkkey, (2012) (Lee et al., 2013) sekitar 80 persen pembakaran hutan dan lahan gambut melibatkan perusahaan perkebunan sawit. Sehingga tak mengherankan, perubahan fungsi lahan menyumbang 75 persen emisi karbon nasional (Cronin, Santoso, Mardiah, & Muharrom,

2015), dan itu menempatkan Indonesia masuk tiga besar negara penghasil karbon di dunia walaupun bukan negara industri (Bissonnette, 2016).

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari ekspansi kelapa sawit menjadi fokus diskusi dan keprihatinan, perluasan areal kebun kelapa sawit adalah faktor utama terjadinya deforestasi dan hilangnya habitat satwa di Indonesia dan tempat lain. Dalam pelaksanaan forum forum diskusi, masalah biofuel selalu menjadi topik utama di mana kebutuhan untuk pengurangan penggunaan karbon menjadi kekhawatiran terkait konversi lahan gambut dan hutan. Namun di samping itu masalah dampak sosial - ekonomi menjadi hal yang banyak dibicarakan selain masalah dampak lingkungan. Pemerintah pusat melakukan pembenaran untuk membiarkan perluasan pengembangan biofuel dan ekspansi kelapa sawit di Indonesia dengan dalih untuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan (Wright, 2014)

Masyithoh, (2017) menyatakan bahwa pengelolaan perkebunan dan pengolahan pasca panen kelapa sawit menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan yaitu :

1. Polusi udara

Pembakaran hasil tebang tanaman pada pembukaan hutan untuk penanaman baru, pembakaran hasil pangkasan tanaman pada penyiangan tanaman dewasa, dan kegiatan ekstraksi dan purifikasi minyak di pabrik penggilingan menjadi penyebab timbulnya polusi udara;

2. Perubahan *land scape*

Kegiatan pembukaan lahan untuk penanaman dan pembuatan jalan kebun menyebabkan perubahan *land scape* yang berakibat pada musnahnya habitat burung, terjadinya fragmentasi habitat dan timbulnya habitat burung yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kegiatan peremajaan perkebunan menyebabkan keanekaragaman burung menjadi menurun bahkan menghilang;

3. Penurunan keragaman genetik sebagai akibat dari penggantian spesies alami yang keragamannya tinggi dengan spesies vegetasi kelapa sawit yang monokultur (keragaman genetik);
4. Polusi tanah dan air dengan penggunaan pestisida dan pupuk. Efisiensi penyerapan pupuk N oleh tanaman kelapa sawit hanya 45% dari jumlah pupuk yang diberikan, begitu juga dengan efisiensi penyerapan pupuk P dan pupuk K hanya mencapai 35% dan 50% dari jumlah pupuk yang diberikan. Pupuk yang tidak terserap tersebut akan tercuci ke sungai dan laut sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti matinya biota yang ada di sungai dan laut. Selain itu penyemprotan pestisida yang digunakan untuk melindungi kelapa sawit dari hama dan gulma mengakibatkan menurunnya kemampuan tanah untuk memproses nutrisi yang berguna bagi tanaman;
5. Polusi tanah akibat pembuangan TBS kosong langsung ke lahan;
6. Perlakuan limbah cair yang kurang baik berakibat pencemaran air sungai.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam berupa hutan pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana dalam pasal 22 disebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Dalam Pasal 32 Undang-undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga diatur mengenai pembukaan dan pengolahan lahan yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
2. Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
3. Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan (Oksana, Irfan, & M Utiyal, 2012) dikemukakan bahwa perkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadinya peningkatan PH tanah yang semula asam menjadi netral, hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme yang menjadi

sangat lambat sehingga nitrogen total akan rendah. Sistem tanam secara monokultur yang dilakukan pada perkebunan kelapa sawit menjadi faktor pemicu hilangnya keanekaragaman hayati. Kegiatan *land clearing* untuk menghilangkan seluruh jenis tanaman dan hewan yang dianggap sebagai hama pengganggu bagi pertumbuhan kelapa sawit telah memutus mata rantai organisme dalam satu habitat sehingga memicu kerentanan pada kondisi alam.

Menurut (Puspitasari, 2019) Manfaat lingkungan yang diberikan perkebunan kelapa sawit jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penanaman kelapa sawit dalam skala besar mengakibatkan karbon yang tersimpan dalam tanah lepas ke udara dan bereaksi dengan oksigen membentuk CO₂ yang berbahaya. Konsep perkebunan kelapa sawit yang bersifat monokultur dan homogenitas mengakibatkan top Oil yang subur akan hilang akibat terjadinya erosi. Kelapa sawit merupakan tanaman sangat rakus air yang setiap harinya membutuhkan air sebanyak 20 – 30 liter/pohon. Berkurangnya kuantitas air pada tanah menyebabkan petani tidak dapat mengembangkan lahan pertanian pasca lahan perkebunan kelapa sawit beroperasi. Tanaman yang berada di sekitar perkebunan tidak dapat tumbuh maksimal, akan terjadi kegagalan panen dengan jumlah produksi 3 kali lebih rendah karena tingkat kesuburan tanah berkurang. Kegiatan perkebunan kelapa sawit, seperti aktivitas pemupukan, pengangkutan hasil, termasuk juga pengolahan tanah dan aktivitas lainnya. Secara kumulatif telah mengakibatkan tanah mengalami penurunan kualitas. Kelapa sawit

yang sangat rakus unsur hara memerlukan pemupukan yang memadai, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan menyebabkan residu dan mematikan organisme tanah. Secara fisik akibat kegiatan tersebut mengakibatkan tanah bertekstur keras, tidak mampu menyerap dan menyimpan air. Seluruh biaya lingkungan yang timbul karena terjadinya kerusakan dan/atau permasalahan lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan melakukan alih fungsi lahan pertanian menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif terhadap lingkungan ini sesungguhnya merupakan kerugian ekonomi yang harus dibayar oleh masyarakat dan/atau pihak lainnya.

Namun pemerintah juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah yang ingin memanfaatkan kawasan hutan untuk dikelola, dengan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, pemerintah memandang perlu dilakukan penyederhanaan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Dalam PP itu disebutkan, perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial, atau untuk wilayah provinsi. Perubahan secara parsial dilakukan melalui : a. tukar-menukar kawasan hutan; atau b. pelepasan kawasan hutan. Pasal Pasal 8 ayat (1,2) PP 104 Tahun 2015 dikemukakan bahwa Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan berdasarkan permohonan, yang diajukan oleh: a. menteri atau

pejabat setingkat menteri; b. gubernur atau bupati/wali kota; c. pimpinan badan hukum; atau d. perorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) PP 104 Tahun 2015 dikemukakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar-menukar, menurut PP ini, hanya dapat dilakukan pada: a. hutan produksi tetap, dan/atau b. hutan produksi terbatas. Mekanisme tukar-menukar sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk: a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan Kawasan Hutan; atau c. memperbaiki batas Kawasan Hutan. Tukar-menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan: a. tetap terjaminnya luas Kawasan Hutan paling sedikit 30% dari luas DAS (Daerah Aliran Sungai), pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, dan b. mempertahankan daya dukung Kawasan Hutan tetap layak kelola,. Lebih lanjut disampaikan bahwa tukar-menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan lahan pengganti dari: a. lahan bukan Kawasan Hutan; dan/atau b. kawasan hutan produksi yang dapat di konservasi, dengan memenuhi persyaratan: a. letak, luas, dan batas lahan pengganti yang jelas; b. terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama; c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional kecuali yang berasal dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang masih produktif; d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan e. mendapat pertimbangan dari gubernur tentang informasi lahan pengganti.

Menurut PP Nomor 104 Tahun 2015, permohonan Tukar-Menukar Kawasan Hutan diajukan oleh pemohon kepada Menteri. Selanjutnya, menteri akan membentuk Tim Terpadu yang akan menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri. Dalam hal Tukar-Menukar Kawasan Hutan dengan luas paling banyak 2 hektar (ha) dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Menteri membentuk tim yang anggotanya berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam Pasal 13 ayat (5) PP Nomor 104 Tahun 2015 tersebut Berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu atau tim sebagaimana dimaksud, Menteri menerbitkan persetujuan prinsip Tukar-Menukar Kawasan Hutan atau penolakan. Dalam hal rekomendasi Tukar-Menukar Kawasan Hutan yang disampaikan Tim Terpadu menunjukkan, bahwa Tukar-Menukar Kawasan Hutan berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, menurut PP ini, Menteri sebelum menerbitkan persetujuan prinsip Tukar-Menukar Kawasan Hutan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

E. Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23. Tahun 2014)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu pemerintah daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan

hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk PERDA maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. (UU Nomor 23. Tahun 2014)

Penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan Daerah, mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk menghindari penyalahgunaan dalam penyelenggaraannya harus melaksanakan pembentukan pengawas yang independen pada semua bidang pelayanan, sehingga pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan dimaksud dapat berhasil guna dan

berdaya guna bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan regulasi hukum yang dinamis dan mencerminkan keadilan masyarakat (Rangkasa, 2017).

Pemberian kewenangan khusus kepada daerah ini sangatlah baik dan dapat berdampak positif jika kinerjanya maksimal bagi kelangsungan hidup masyarakat, namun realitanya pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang masih di bawah rata – rata, dapat di katakan masyarakat belum sejahtera (Iryanti, 2014).

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1.	<p>Krystof Obidzinski, Rubeta Andriani, Heru Komarudin , and Agus Andrianto (2012)</p> <p>Judul :</p> <p><i>Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia</i></p>	<p>Untuk mengetahui dampak lingkungan dan sosial dari perkebunan kelapa sawit.</p>	<p>deskriptif kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Praktek perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan terjadinya terjadi penurunan tutupan lahan, penggundulan hutan telah mempengaruhi kegiatan kehutanan masyarakat, deforestasi telah menyebabkan pendangkalan saluran air dan rawa, terjadi, erosi tanah, pendangkalan, dan penurunan kualitas dan kuantitas air serta menyebabkan polusi udara dianggap sebagai dampak lingkungan penting dari pengembangan perkebunan</p> <p>Perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan dampak sosial yaitu terjadinya konflik sengketa tanah antara masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan. Bentuk konflik lain yaitu antara masyarakat lokal dengan komunitas transmigran. pemerintah secara rutin mengalokasikan tanah lokal untuk pembangunan masyarakat transmigrasi yang menyebabkan konflik setelah berdirinya pemukiman transmigrasi.</p>

No.	Nama Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil
2.	<p>Rizka Amalia, Arya Hadi Dharmawan, Lilik B. Prasetyo, Pablo Pacheco (2019)</p> <p>Judul : Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kecepatan ekspansi dan peran petani dalam perluasan perkebunan kelapa sawit, 2. menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan ekologi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit serta kaitannya dengan implementasi tata kelola perkebunan kelapa sawit. 	deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspansi perkebunan kelapa sawit pada tahun 1990-2005 cenderung berjalan secara lambat, sedangkan pada tahun 2005-2016 ekspansi kelapa sawit cenderung berjalan secara cepat. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani kelapa sawit plasma yang mempunyai perkebunan kelapa sawit mandiri dan petani mandiri karena distimulasi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta dan didorong atas adanya pasar ekonomi lokal kelapa sawit 2. Dampak ekonomi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yaitu terjadinya transformasi mata pencaharian rumah tangga petani dari petani ladang, pekebun karet dan nelayan berubah menjadi petani perkebunan kelapa sawit yang kemudian mengakibatkan dominasi persentase nafkahnya dari usaha pertanian kelapa sawit. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak pada tingginya frekuensi konflik sosial khususnya konflik antar petani dan petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

No.	Nama Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil
				Maraknya ekspansi kelapa sawit juga berdampak pada ekologi khususnya pada perubahan tutupan lahan hutan yang mengakibatkan perubahan suhu udara, hilangnya biodiversitas, banjir, erosi tanah dan jasa lingkungan.
3.	<p>Jean-François Bissonnette (2016)</p> <p>Judul :</p> <p><i>Is oil palm agribusiness a sustainable development option for Indonesia? A review of issues and options</i></p>	<p>Untuk mengetahui apakah Indonesia mampu mengembangkan industri kelapa sawit berkelanjutan. Dengan melihat berbagai masalah yang terjadi serta pilihan-pilihan pengembangan yang bisa dilakukan</p>	<p>Analisis deskriptif kualitatif</p>	<p>Konsep pengembangan industri kelapa sawit Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai catatan, harus ada pemahaman yang sama tentang lingkungan dan ekonomi masyarakat kecil. Saat ini RSPO dan ISPO merupakan lembaga utama yang diakui dan ditunjuk untuk mereformasi industri kelapa sawit. Namun, RSPO dan ISPO gagal memberikan kriteria keberlanjutan fungsional berdasarkan data ilmiah yang kuat, baik pada kelayakan agroekologi atau sosial ekonomi. Aktivis seperti Greenpeace (2013) dengan cepat menunjukkan batas keberlanjutan sertifikasi, seperti kawasan hutan, bersama dengan keanekaragaman hayati, terus menurun di Sumatra dan Kalimantan, dan kebakaran hutan yang terjadi berulang kali memiliki dampak bencana baru-baru ini berupa emisi karbon global. Dalam skala industri besar telah menjadi masalah yang</p>

No.	Nama Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil
				berlarut-larut terkait dengan perampasan tanah warga oleh perusahaan. Isu lingkungan menjadi fokus dalam beberapa dekade mendatang seiring dengan meningkatnya permintaan global akan pangan dan energi.
4.	<p>Alison Wrigth (2014)</p> <p>Judul :</p> <p><i>Socio-Economic Impacts of Palm Oil and Biodiesel: The Case of Indonesia</i></p>	<p>Untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari kelapa sawit dan Biodiesel di Indonesia</p>	<p>Analisis deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dampak dari tanaman kelapa sawit di Indonesia sangat pesat bahkan tanpa permintaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Perluasan perkebunan menciptakan peluang kerja baru dan mentransformasikan ekonomi pedesaan, tetapi juga memicu konflik sosial di beberapa daerah. Dampak pada daerah dengan perkebunan kelapa sawit yang sudah mapan, seperti Sumatera Utara, cenderung berbeda secara substansial dari daerah di mana perkebunan saat ini berkembang, khususnya dalam hal intensitas pekerjaan dan konflik sosial. studi juga menunjukkan kompleksitas beberapa dampak sosial-ekonomi; sementara produksi minyak kelapa sawit pasti berdampak dalam berbagai cara pada dimensi ketahanan pangan, hubungan sebab akibat memerlukan analisis lebih lanjut dan juga tampak berbeda antar daerah. Contoh-contoh yang dianalisis dalam penelitian ini</p>

No.	Nama Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil
				<p>juga menunjukkan potensi petani kecil untuk mendapat manfaat dari produksi minyak sawit bervariasi secara regional; dalam hal ini, petani kecil di Sumatera Utara mengalami manfaat yang lebih besar daripada di Jambi. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah perlunya kehati-hatian dalam generalisasi hasil penelitian tentang dampak sosial-ekonomi minyak sawit, dan contoh apa pun yang mengklaim sebagai 'representatif' seharusnya diperlakukan dengan hati-hati</p>
5.	<p>Varsha Vijay, Stuart L. Pimm, Clinton N. Jenkins, Sharon J. Smith (2016)</p> <p>Judul :</p> <p><i>The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kelapa sawit terhadap pengurangan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati.</p>	<p>Analisis deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kehilangan hutan untuk produksi kelapa sawit di berbagai negara dan benua, meningkatkan kekhawatiran tentang ekspansi perkebunan kelapa sawit di masa mendatang. satu poin penting untuk menekan tingkat kehilangan hutan yaitu dengan meningkatkan tekanan dan intervensi khusus serta pemantauan kepada negara Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini di Asia Tenggara, Peru, Ekuador, dan Brasil di Amerika Selatan, dan Kamerun di Afrika. Penelitian ini juga menemukan bahwa prioritas konservasi tergantung pada kriteria taksasi dan seleksi. Dengan satu kriteria</p>

No.	Nama Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil
				atau yang lain, hampir semua hutan yang rentan terhadap pengembangan kelapa sawit memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Ekspansi kelapa sawit dengan mengorbankan hutan alam menjadi perhatian konservasi di seluruh wilayah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penegakan peraturan pemerintah dan pemantauan.
6.	Galuh Masyithoh (2017) Judul : Perbandingan keanekaragaman jenis mamalia dan Burung antara perkebunan sawit besar Dengan kebun sawit swadaya	Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap dampak perkebunan sawit besar dan kebun sawit swadaya bagi keberadaan satwa liar	Analisis deskriptif	Masyarakat menilai pengaruh positif perkebunan sawit besar bagi satwa liar lebih tinggi dibanding kebun sawit swadaya, namun demikian baik perkebunan sawit besar dan kebun sawit swadaya memiliki pengaruh positif bagi keberadaan satwa liar
7.	Almasdi Syahza (2011) Judul ; Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	Mengidentifikasi Apakah kegiatan kelapa sawit dapat menciptakan <i>multiplier effect</i> ekonomi yang besar di daerah pedesaan dan Apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah pedesaan terutama dari sektor pendapatan. Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit secara ekonomi dapat

No.	Nama Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil
				<p>meningkatkan perekonomian dengan menciptakan daya beli di daerah pedesaan, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk mengubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan sawit masih tinggi. Dari sisi lain pembukaan perkebunan sawit akan membutuhkan lahan, apabila hal ini tidak dikendalikan oleh pembuat kebijakan, maka akan terjadi alih fungsi lahan di daerah pedesaan</p>